1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

   Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), perkembangan inflasi tahunan (year-on-year/y-on-y) Kabupaten Berau selama Triwulan III Tahun 2026 menunjukkan kecenderungan meningkat pada akhir triwulan. Inflasi tahunan tercatat sebesar 2,88 persen pada Juli, 3,31 persen pada Agustus, dan 3,99 persen pada September 2026.

   kenaikan inflasi tahunan sebesar 1,11 poin persentase dari Juli hingga September 2026. Kondisi ini perlu menjadi perhatian TPID Kabupaten Berau, khususnya dalam mengantisipasi kenaikan harga komoditas pangan strategis serta barang dan jasa yang berpengaruh terhadap daya beli masyarakat.

   Sebagai pembanding, inflasi tahunan Provinsi Kalimantan Timur pada Agustus 2026 tercatat sebesar 3,83 persen, sedangkan Kabupaten Berau sebesar 3,31 persen. Perlu diperhatikan bahwa inflasi tahunan berbeda dengan inflasi bulanan (month-to-month/m-to-m). Oleh karena itu, evaluasi Triwulan III sebaiknya juga mencakup perubahan harga setiap bulan dan komoditas penyumbang inflasi atau deflasi.

   Perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting (Bapokting) di Kabupaten Berau perlu dicermati karena perubahan harga komoditas dapat memengaruhi inflasi dan daya beli masyarakat. Pemantauan terutama perlu dilakukan terhadap beras, cabai merah, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, telur ayam ras, daging ayam ras, daging sapi, minyak goreng, gula pasir, serta ikan segar. Selain bahan pangan, pemantauan perlu mencakup tarif angkutan, biaya pendidikan, kebutuhan rumah tangga, dan jasa lainnya yang berpotensi memengaruhi pengeluaran masyarakat.

   Untuk laporan Triwulan III Tahun 2026, perubahan harga masing-masing komoditas perlu dicocokkan dengan data harga konsumen BPS dan hasil pemantauan harga di Pasar Sanggam Adji Dilayas serta pasar-pasar lainnya di Kabupaten Berau. Data yang tersedia dalam rilis inflasi agregat belum cukup untuk memastikan komoditas mana yang mengalami kenaikan harga tertinggi atau menjadi penyumbang inflasi terbesar di Berau selama Juli–September 2026.

   Memasuki Triwulan IV Tahun 2026, terdapat sejumlah risiko yang perlu diantisipasi oleh TPID Kabupaten Berau, yaitu:

   - Fluktuasi harga komoditas pangan. Perubahan pasokan dan permintaan bahan pangan strategis dapat memicu kenaikan harga, terutama apabila pasokan dari daerah produsen tidak mencukupi kebutuhan masyarakat.
   - Ketergantungan pasokan dari luar daerah. Ketergantungan terhadap distribusi antardaerah dapat meningkatkan kerentanan terhadap gangguan transportasi, kenaikan ongkos angkut, dan keterlambatan pengiriman.
   - Peningkatan permintaan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Peningkatan konsumsi masyarakat menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 berpotensi mendorong kenaikan harga sejumlah bahan pangan dan kebutuhan rumah tangga.
   - Kenaikan biaya transportasi dan distribusi. Perubahan biaya logistik dapat memengaruhi harga jual barang, terutama komoditas yang didatangkan dari luar Kabupaten Berau.
   - Peningkatan inflasi tahunan. Inflasi tahunan Kabupaten Berau yang mencapai 3,99

persen pada September 2026 perlu menjadi perhatian agar tekanan harga tidak berlanjut dan mengurangi daya beli masyarakat.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Dalam rangka pelaksanaan pengendalian inflasi daerah Kabupaten Berau pada Triwulan III Tahun 2026 (Juli–September 2026), terdapat beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Permasalahan tersebut berkaitan dengan keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta efektivitas komunikasi dan koordinasi antarpemangku kepentingan.

Adapun identifikasi permasalahan pengendalian inflasi daerah Kabupaten Berau dapat diuraikan sebagai berikut.

- Fluktuasi harga barang kebutuhan pokok dan penting (Bapokting). Perubahan harga komoditas pangan strategis, seperti beras, cabai, bawang merah, bawang putih, telur ayam ras, daging ayam ras, dan ikan segar, berpotensi memengaruhi tingkat inflasi serta daya beli masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pemantauan harga secara berkala untuk mengantisipasi kenaikan harga yang signifikan.
- Ketergantungan pasokan dari luar daerah. Sebagian kebutuhan pangan dan barang pokok masyarakat Kabupaten Berau masih dipenuhi melalui pasokan dari luar daerah. Kondisi tersebut menyebabkan harga komoditas rentan terhadap perubahan harga di daerah produsen, gangguan distribusi, serta peningkatan biaya transportasi dan logistic.
- Tantangan kelancaran distribusi dan biaya logistik. Kondisi geografis Kabupaten Berau serta jarak antara sentra produksi, pusat distribusi, dan wilayah konsumen dapat memengaruhi kelancaran distribusi barang. Apabila terjadi keterlambatan pengiriman atau peningkatan biaya angkut, harga barang di tingkat konsumen berpotensi mengalami kenaikan.
- Ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan. Perubahan pola konsumsi masyarakat, peningkatan permintaan pada periode tertentu, serta keterbatasan pasokan komoditas dapat menimbulkan tekanan harga. Kondisi ini perlu diantisipasi, khususnya menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), Natal 2026, dan Tahun Baru 2027.
- Optimalisasi produksi pangan lokal. Pengembangan produksi pangan lokal masih perlu diperkuat agar dapat mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Peningkatan produktivitas pertanian, perikanan, dan peternakan, disertai penguatan sarana produksi serta akses pemasaran, diperlukan untuk mengurangi kerentanan terhadap perubahan pasokan dari luar daerah.
- Penguatan pemantauan harga dan ketersediaan stok. Data harga, stok, dan distribusi komoditas strategis perlu diperbarui secara berkala dan dikoordinasikan antarperangkat daerah serta instansi terkait. Ketersediaan data yang akurat dan tepat waktu penting untuk mendeteksi potensi kenaikan harga serta menentukan langkah intervensi yang sesuai.
- Efektivitas pelaksanaan intervensi pasar. Pelaksanaan operasi pasar murah dan kegiatan stabilisasi harga perlu disesuaikan dengan komoditas yang mengalami kenaikan harga, lokasi yang membutuhkan intervensi, serta kelompok masyarakat yang terdampak. Evaluasi diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut mampu meningkatkan keterjangkauan harga dan membantu memenuhi kebutuhan masyarakat.
- Penguatan koordinasi dan kerja sama antardaerah. Kerja sama dengan daerah produsen, Bulog, distributor, pelaku usaha, dan instansi terkait perlu terus dioptimalkan untuk menjaga kesinambungan pasokan. Koordinasi yang efektif diperlukan agar potensi

kekurangan stok dapat diantisipasi lebih awal dan distribusi komoditas strategis tetap berjalan lancar.
    - Risiko peningkatan tekanan inflasi pada Triwulan IV 2026. Peningkatan kebutuhan masyarakat menjelang Natal dan Tahun Baru berpotensi mendorong permintaan terhadap bahan pangan dan kebutuhan rumah tangga. Oleh sebab itu, diperlukan langkah antisipatif melalui pengamanan stok, pemantauan harga, pengawasan distribusi, dan penguatan koordinasi TPID.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi daerah Kabupaten Berau pada Triwulan III Tahun 2026 (Juli–September 2026) diarahkan untuk menjaga stabilitas harga, menjamin ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok dan penting (Bapokting), memastikan kelancaran distribusi, serta menjaga daya beli masyarakat. Upaya tersebut dilaksanakan melalui koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama perangkat daerah, instansi terkait, Bulog, distributor, pelaku usaha, dan pihak lainnya.

Adapun pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi daerah Kabupaten Berau dapat diuraikan sebagai berikut.

- Pemantauan harga dan ketersediaan pasokan

Pemantauan harga barang kebutuhan pokok dan penting dilakukan untuk mengetahui perkembangan harga di pasar serta mengantisipasi potensi kenaikan harga komoditas strategis. Pemantauan juga perlu mencakup ketersediaan stok, kelancaran distribusi, dan kesesuaian harga jual dengan ketentuan yang berlaku. Hasil pemantauan menjadi dasar bagi TPID dalam menentukan langkah tindak lanjut untuk menjaga stabilitas harga di Kabupaten Berau.

- Pelaksanaan operasi pasar dan pasar murah

Operasi pasar dan pasar murah menjadi salah satu instrumen pengendalian inflasi untuk membantu masyarakat memperoleh barang kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Pelaksanaan kegiatan perlu diprioritaskan pada wilayah dan komoditas yang mengalami kenaikan harga atau berpotensi mengalami gangguan pasokan, sehingga manfaat intervensi dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

- Penguatan koordinasi dengan Bulog dan distributor

Koordinasi dengan Bulog dan distributor dilakukan untuk mendukung ketersediaan beras, minyak goreng, gula pasir, serta komoditas strategis lainnya. Langkah ini diperlukan untuk mengantisipasi kekurangan pasokan, menjaga kelancaran distribusi, dan mendukung stabilisasi harga di tingkat konsumen.

- Optimalisasi Kerja Sama Antar Daerah (KAD)

Kerja Sama Antar Daerah dioptimalkan sebagai upaya memperkuat pasokan komoditas pangan dari daerah produsen ke Kabupaten Berau. Kerja sama ini diharapkan dapat mengurangi risiko kekurangan pasokan, menjaga kesinambungan distribusi, dan meminimalkan dampak kenaikan harga dari daerah pemasok.

Penguatan produksi dan distribusi pangan lokal

Pengembangan sektor pertanian, perikanan, dan peternakan lokal perlu didorong untuk meningkatkan ketersediaan pangan serta mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah. Upaya ini dapat dilakukan melalui dukungan sarana produksi, peningkatan produktivitas, penguatan akses pemasaran, serta koordinasi antara produsen lokal dan pelaku distribusi.

- Pengawasan distribusi dan perdagangan

Pengawasan terhadap distribusi dan perdagangan barang kebutuhan pokok dilakukan untuk mengantisipasi praktik perdagangan yang dapat mengganggu stabilitas harga dan ketersediaan barang. Koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi terkait diperlukan untuk memastikan distribusi berjalan lancar serta mencegah penimbunan atau penyimpangan dalam perdagangan sesuai ketentuan yang berlaku.

- Penguatan koordinasi dan evaluasi TPID

Koordinasi TPID dilakukan untuk menyelaraskan langkah antarperangkat daerah dan instansi terkait dalam merespons perkembangan harga dan pasokan. Evaluasi secara berkala diperlukan untuk mengidentifikasi komoditas penyumbang inflasi, menilai efektivitas kebijakan yang telah dilaksanakan, serta merumuskan langkah antisipasi terhadap risiko kenaikan harga pada Triwulan IV Tahun 2026, khususnya menjelang Natal dan Tahun Baru.

- Penguatan komunikasi kepada masyarakat

Penyampaian informasi mengenai perkembangan harga, ketersediaan pasokan, lokasi pasar murah, serta imbauan belanja bijak perlu dilakukan secara berkala. Komunikasi yang efektif diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh informasi yang akurat, mencegah kepanikan dalam berbelanja, dan mendukung upaya menjaga stabilitas harga.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi daerah Kabupaten Berau pada Triwulan III Tahun 2026 (Juli–September 2026) dilakukan untuk menilai pelaksanaan berbagai upaya pengendalian inflasi, khususnya dalam menjaga keterjangkauan harga, menjamin ketersediaan pasokan, memastikan kelancaran distribusi, serta meningkatkan efektivitas komunikasi kepada masyarakat. Evaluasi ini menjadi dasar untuk mengidentifikasi kendala pelaksanaan kebijakan dan merumuskan langkah perbaikan pada triwulan berikutnya.

Adapun evaluasi kebijakan pengendalian inflasi daerah Kabupaten Berau dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Evaluasi keterjangkauan harga

Pemantauan harga dan pelaksanaan intervensi pasar merupakan langkah penting untuk menjaga keterjangkauan harga barang kebutuhan pokok dan penting (Bapokting). Namun, efektivitas upaya tersebut perlu dinilai berdasarkan perkembangan harga setiap komoditas, jangkauan pelaksanaan kegiatan, dan perubahan harga sebelum serta sesudah intervensi. Peningkatan inflasi tahunan Kabupaten Berau dari 2,88 persen pada Juli menjadi 3,99 persen

-

pada September 2026 menunjukkan perlunya penguatan langkah pengendalian harga secara lebih terarah.

2. Evaluasi ketersediaan pasokan

Ketersediaan pasokan menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas harga di Kabupaten Berau. Koordinasi dengan Bulog, distributor, dan pelaku usaha perlu terus diperkuat untuk memastikan ketersediaan stok komoditas strategis. Evaluasi perlu mencakup kecukupan stok, kesinambungan pasokan, serta kemampuan daerah dalam mengantisipasi peningkatan permintaan dan gangguan pasokan dari daerah produsen.

3. Evaluasi kelancaran distribusi dan biaya logistik

Kelancaran distribusi berpengaruh terhadap ketersediaan dan harga barang di tingkat konsumen. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap ketepatan waktu pengiriman, biaya angkut, serta distribusi barang ke kecamatan yang memiliki keterbatasan akses. Perbaikan koordinasi antara pemerintah daerah, distributor, dan pelaku usaha diperlukan agar hambatan distribusi dapat diidentifikasi dan ditangani secara tepat.

4. Evaluasi pelaksanaan operasi pasar dan pasar murah

Operasi pasar dan pasar murah perlu dievaluasi berdasarkan ketepatan sasaran, jenis komoditas yang disediakan, jumlah barang yang disalurkan, lokasi pelaksanaan, serta keterjangkauan harga bagi masyarakat. Hasil evaluasi tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa intervensi pasar memberikan manfaat nyata, terutama di wilayah yang mengalami kenaikan harga atau keterbatasan pasokan.

5. Evaluasi efektivitas Kerja Sama Antar Daerah (KAD)

Kerja Sama Antar Daerah perlu dievaluasi dari sisi kesinambungan pasokan, volume komoditas yang dipasok, ketepatan waktu distribusi, dan manfaatnya terhadap stabilitas harga. Penguatan kerja sama dengan daerah produsen diharapkan dapat membantu mengurangi risiko kekurangan pasokan serta meningkatkan ketahanan pangan Kabupaten Berau.

6. Evaluasi koordinasi dan pengawasan pasar

Koordinasi antara TPID, perangkat daerah, Bulog, distributor, dan instansi terkait perlu terus ditingkatkan agar informasi mengenai harga, stok, dan potensi gangguan distribusi dapat ditindaklanjuti secara cepat. Pengawasan pasar juga perlu dilakukan secara konsisten untuk mengantisipasi penimbunan, hambatan distribusi, dan praktik perdagangan yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

7. Evaluasi pemanfaatan data dan komunikasi publik

Ketersediaan data harga dan stok yang akurat serta mutakhir menjadi dasar penting dalam menentukan kebijakan pengendalian inflasi. Evaluasi perlu diarahkan pada ketepatan waktu pelaporan, integrasi informasi antarinstansi, dan pemanfaatan data dalam pengambilan keputusan. Di samping itu, penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai harga, ketersediaan pasokan, dan pelaksanaan pasar murah perlu diperkuat agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas dan dapat dipercaya.

Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Berdasarkan perkembangan inflasi dan evaluasi kebijakan pengendalian inflasi daerah Kabupaten Berau pada Triwulan III Tahun 2026 (Juli–September 2026), diperlukan langkah strategis dan berkelanjutan untuk menjaga stabilitas harga, menjamin ketersediaan pasokan, memperlancar distribusi barang kebutuhan pokok dan penting (Bapokting), serta mempertahankan daya beli masyarakat. Peningkatan inflasi tahunan hingga September 2026 menjadi perhatian bagi TPID Kabupaten Berau untuk memperkuat langkah antisipasi, khususnya menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.

Adapun rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi daerah Kabupaten Berau adalah sebagai berikut.

- Meningkatkan intensitas pemantauan harga dan stok Bapokting

TPID Kabupaten Berau perlu meningkatkan pemantauan harga dan ketersediaan stok komoditas strategis secara berkala di pasar tradisional, distributor, dan gudang penyimpanan. Pemantauan diprioritaskan pada komoditas yang mengalami kenaikan harga signifikan atau berpotensi mengalami gangguan pasokan. Hasil pemantauan perlu menjadi dasar penetapan langkah intervensi yang cepat, tepat sasaran, dan sesuai dengan kondisi pasar.

- Mengoptimalkan pelaksanaan operasi pasar dan pasar murah

Pelaksanaan operasi pasar dan pasar murah perlu disesuaikan dengan perkembangan harga dan kebutuhan masyarakat di setiap wilayah. Pemerintah daerah disarankan memprioritaskan komoditas yang mengalami kenaikan harga serta lokasi yang menghadapi keterbatasan pasokan. Evaluasi terhadap harga jual, volume komoditas, dan jumlah masyarakat penerima manfaat juga perlu dilakukan untuk memastikan efektivitas kegiatan.

- Memperkuat Kerja Sama Antar Daerah (KAD)

Pemerintah Kabupaten Berau perlu memperkuat kerja sama dengan daerah penghasil pangan untuk menjamin kesinambungan pasokan komoditas strategis. Kerja sama dapat diarahkan pada pemenuhan kebutuhan beras, sayuran, cabai, bawang merah, telur ayam ras, dan komoditas lainnya sesuai kebutuhan daerah. Penguatan KAD diharapkan dapat mengurangi risiko kekurangan pasokan dan menekan dampak kenaikan harga dari daerah pemasok.

- Menjamin ketersediaan stok dan kelancaran distribusi pangan

Koordinasi dengan Bulog, distributor, dan pelaku usaha perlu ditingkatkan untuk memastikan kecukupan stok serta kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok. Pemerintah daerah juga perlu mengidentifikasi potensi hambatan transportasi dan peningkatan biaya logistik yang dapat memengaruhi harga di tingkat konsumen. Langkah antisipasi perlu disiapkan agar distribusi tetap berjalan lancar, terutama menuju wilayah yang memiliki akses terbatas.

- Mendorong peningkatan produksi pangan lokal

Peningkatan produksi pangan lokal perlu menjadi prioritas jangka menengah dan panjang untuk memperkuat ketahanan pangan Kabupaten Berau. Upaya tersebut dapat dilakukan

5.

melalui dukungan sarana dan prasarana pertanian, perikanan, serta peternakan; peningkatan produktivitas; penguatan akses pasar; dan pengembangan kemitraan antara produsen lokal dengan pedagang maupun distributor. Dengan demikian, ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah dapat dikurangi secara bertahap.

- Memperkuat pengawasan distribusi dan perdagangan

Pengawasan pasar perlu dilaksanakan secara berkala melalui koordinasi perangkat daerah dan instansi terkait untuk mengantisipasi penimbunan barang, hambatan distribusi, serta praktik perdagangan yang melanggar ketentuan. Pengawasan juga perlu memastikan kepatuhan terhadap ketentuan harga yang berlaku, termasuk Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk komoditas yang diatur pemerintah.

- Meningkatkan integrasi data dan koordinasi TPID

TPID Kabupaten Berau perlu memperkuat pertukaran data dan informasi mengenai perkembangan harga, ketersediaan stok, kebutuhan konsumsi, dan distribusi antarwilayah. Data yang akurat dan diperbarui secara berkala dapat digunakan sebagai dasar untuk mengidentifikasi komoditas berisiko, menentukan lokasi prioritas intervensi, serta mengevaluasi efektivitas kebijakan yang telah dilaksanakan. Koordinasi lintas perangkat daerah dan instansi terkait perlu dilakukan secara konsisten agar penanganan permasalahan dapat dilaksanakan secara terpadu.

- Mengantisipasi kenaikan harga menjelang Natal dan Tahun Baru

Menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027, TPID Kabupaten Berau perlu menyiapkan langkah antisipatif melalui pemantauan harga yang lebih intensif, pengamanan stok komoditas strategis, penguatan distribusi, serta pelaksanaan pasar murah apabila diperlukan. Koordinasi dengan Bulog, distributor, dan pelaku usaha perlu ditingkatkan untuk mengantisipasi lonjakan permintaan serta memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dengan harga terjangkau.

- Memperkuat komunikasi publik dan gerakan belanja bijak

Pemerintah daerah perlu meningkatkan penyebarluasan informasi mengenai perkembangan harga, ketersediaan pasokan, lokasi pasar murah, dan imbauan belanja sesuai kebutuhan. Edukasi kepada masyarakat mengenai konsumsi pangan yang bijak, pencegahan pemborosan pangan, serta pemanfaatan pangan lokal juga perlu diperkuat untuk mendukung stabilitas permintaan dan ketahanan pangan daerah.